



Article Informations
Corresponding Email:
difatsny@gmail.com

Received: 28/08/2024; Accepted:
08/02/2025; Published: 17/02/2025

KEPENTINGAN NASIONAL AMERIKA SERIKAT BERGABUNG KEMBALI PADA PARIS AGREEMENT TAHUN 2021

Difa Tsaniya Fauziyyah

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

ABSTRAK

Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bawah pemerintahan Joe Biden beradaptasi untuk mengintegrasikan isu perubahan iklim sebagai bagian dari kepentingan nasionalnya. Melalui penggunaan *soft power* dan diplomasi ekonomi, pemerintahan Biden berupaya mengembalikan peran Amerika Serikat sebagai pemimpin global dalam isu lingkungan, yang sebelumnya mengalami kemunduran di bawah pemerintahan Donald Trump. Penelitian ini didasarkan pada pendekatan English School dengan konsep Kepentingan nasional, Kebijakan Luar Negeri, dan diplomasi. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan tipe penelitian eksplanatif. Penelitian ini menggunakan metode studi Pustaka. Dalam penelitian ini menemukan bahwa Di bawah pemerintahan Joe Biden, Amerika Serikat menekankan penggunaan *soft power* untuk meningkatkan pengaruh globalnya melalui partisipasi aktif dalam isu-isu lingkungan internasional, seperti bergabung kembali dengan Perjanjian Paris. Kebijakan ini sejalan dengan kepentingan keamanan nasional AS, yang melihat perubahan iklim sebagai ancaman signifikan terhadap stabilitas global dan keamanan nasional. Selain itu, pendekatan ini menunjukkan kepentingan ekonomi Amerika Serikat dengan memanfaatkan diplomasi ekonomi dan kebijakan perdagangan yang mendukung transisi ke energi bersih dan inovasi teknologi, sambil mengatasi dampak ekonomi dari kebijakan lingkungan. Pemerintahan Biden juga menegaskan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi dan keberlanjutan lingkungan, yang memperkuat identitas Amerika Serikat sebagai pemimpin global yang bertanggung jawab. kebijakan luar negeri Amerika Serikat dibawah Pemerintahan Biden tidak hanya bertujuan untuk mengatasi lingkungan, tetapi juga untuk memajukan kepentingan nasional yang lebih luas, yang mencakup pada aspek keamanan, ekonomi dan identitas nilai.

Kata Kunci: Amerika Serikat, Kebijakan Luar Negeri, Paris Agreement, Kepentingan Nasional

ABSTRACT

This research explains how United States foreign policy under the Joe Biden administration is adapting to integrate the issue of climate change as part of its national interests. Through the use of soft power and economic diplomacy, the Biden administration is seeking to restore the United States' role as a global leader on environmental issues, which previously experienced a setback under Donald Trump's administration. This research is based on the English School approach with the concepts of national interests, foreign policy and diplomacy. This research uses a qualitative method with an explanatory research type. This research uses the library study method. This research found that Under the Joe Biden administration, the United States emphasized the use of soft power to increase its global influence through active participation in international environmental issues, such as rejoining the Paris Agreement. This policy is in line with US national security interests, which view climate change as a significant threat to global stability and national security. Additionally, this approach addresses the United States' economic interests by leveraging economic diplomacy and trade policies that support the transition to clean energy and technological innovation, while addressing the economic impacts of environmental policies. The Biden administration also affirmed a commitment to democratic values and environmental sustainability, strengthening the United States' identity as a responsible global leader. United States foreign policy under the Biden Administration does not only aim to address the environment, but also to advance broader national interests, which include aspects of security, economics and value identity.

Keywords: United States, Foreign Policy, Paris Agreement, National Interest

PENDAHULUAN

Amerika Serikat merupakan salah satu negara penghasil emisi karbondioksida terbesar di dunia setelah China. Menurut *United State Energy-related CO2 emissions*, pada tahun 2021 Amerika Serikat mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2020. Amerika Serikat juga merupakan negara yang mengikuti *Paris Agreement* pada saat pertama kali dibentuk tahun 2015 yang pada saat itu Amerika Serikat berada di bawah kepemimpinan Presiden Barrack Obama. Namun hal yang mengejutkan muncul pada tahun 2017 dibawah kepemimpinan Donald Trump, Amerika Serikat mengumumkan untuk menarik diri dari *Paris Agreement*.

Amerika Serikat yang memilih untuk menarik diri dari *Paris Agreement* memberikan dampak bagi dunia internasional yang sangat signifikan, sebab Amerika Serikat mempunyai peran yang sangat penting sebagai negara adikuasa serta sebagai salah satu negara penghasil emisi terbesar. Dengan

keputusan menarik diri dari *Paris Agreement*, hal tersebut memberikan dampak bagi pemanasan global yang akan semakin meningkat, sebab Amerika Serikat sendiri merupakan penyumbang emisi gas terbesar kedua.

Donald Trump beranggapan bahwa dengan mengikutsertakan Amerika Serikat pada *Paris Agreement* merupakan hal yang merugikan bagi perekonomian Amerika Serikat, dengan berkomitmen dan bergabung pada *Paris Agreement* secara tidak langsung membuat Amerika Serikat terpaksa untuk tidak menghasilkan emisi gas di atas standar yang telah ditetapkan dalam perjanjian tersebut. Setelah berakhirnya masa pemerintahan Donald Trump yaitu pada tahun 2020 dan terpilihnya presiden selanjutnya yaitu Joe Biden, maka beberapa kebijakan pun berubah seperti pada masa pemerintahannya Joe Biden membuat kebijakan untuk kembali pada *Paris Agreement*. Amerika Serikat melakukan beberapa langkah untuk membuat kepercayaan anggota dari *Paris Agreement* kembali padanya, diantaranya dengan berpartisipasi dalam negosiasi internasional terkait perubahan iklim, seperti *Conference of the Parties* (COP) yang diadakan setiap tahun. Hal tersebut membuat kepercayaan global kembali untuk melawan isu perubahan iklim. Dengan kembalinya Amerika Serikat pada *Paris Agreement* artinya menambah pendanaan bagi rezim perubahan iklim untuk mengoptimalkan tujuannya untuk mengurangi suhu bumi menjadi 1,5 derajat *celcius* dan di bawah 2 derajat *celcius*.

Presiden Joe Biden telah merencanakan sejak masa kampanye mengenai kembalinya Amerika Serikat pada *Paris Agreement*, hal tersebut bertujuan untuk meneruskan komitmen yang telah dibentuk oleh mantan presiden sebelumnya yaitu Presiden Barack Obama. Selain itu alasan lain Amerika Serikat memilih untuk kembali bergabung yaitu, Amerika Serikat ingin memperbaiki kredibilitasnya sebagai negara pemimpin dalam politik lingkungan. Kemudian, pada saat pemerintahan Joe Biden, untuk mencegah AS kembali mengalami emisi gas karbon maka memutuskan untuk kembali pada *Paris Agreement*. Amerika Serikat telah melakukan penarikan diri dari *Paris Agreement* pada tahun 2017, namun pada tahun 2021 Amerika Serikat kembali bergabung dengan *Paris Agreement*. Dalam hal tersebut penulis ingin

meneliti kepentingan Amerika Serikat terhadap *Paris Agreement* pada tahun 2021, sebab dengan bergabungnya kembali Amerika Serikat tentu terdapat kepentingan nasional yang ingin diraih.

Dalam Penelitian ini peneliti memilih metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif dapat dijelaskan sebagai pendekatan yang bertujuan untuk memahami fenomena seperti pengalaman yang bertujuan untuk memahami fenomena seperti pengalaman, persepsi, motivasi, Tindakan, dll., dari sudut pandang holistic. Pendekatan Kualitatif menurut Creswell yaitu '*Qualitative research focuses on the process that is occurring as well at the product or outcome. Research are particulars interested in understanding how things occurs.* Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami konteks dan kompleksitas isu yang diteliti secara mendalam. Dengan penelitian kualitatif, peneliti menjelaskan mengapa Amerika Serikat bergabung kembali *pada Paris Agreement* tahun 2021. Penelitian ini menggunakan tipe eksplanatif atau eksplanatori. Tipe penelitian ini ialah jenis penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif untuk memaparkan atau menjelaskan fenomena atau peristiwa. Penelitian eksplanatif memiliki tujuan utama yaitu, untuk memahami hubungan sebab-akibat, dinamika kompleks, ataupun faktor-faktor yang mempengaruhi suatu kejadian.

Peneliti mengadopsi metode studi Pustaka atau penelitian perpustakaan (*Library research*). Metode ini melibatkan memahami dan mempelajari teori – teori yang relevan dari berbagai sumber literatur terkait dengan penelitian ini. Data yang telah dikumpulkan oleh peneliti diperlukan analisis data melalui proses reduksi data. Reduksi data merupakan langkah untuk memilih, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mentransformasi data yang diperoleh di lapangan. Hal ini melibatkan rangkaian yang esensial, memfokuskan pada aspek – aspek penting, serta mencari tema dan pola yang muncul. Setelah proses reduksi data, tahap selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti matriks, diagram, grafik jaringan, dan sebagainya. Langkah terakhir dalam proses analisis data adalah penarikan kesimpulan

dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dan verifikasi data adalah tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif, yang melibatkan evaluasi hasil reduksi data sesuai dengan tujuan penelitian. Tahap ini bertujuan untuk menggali makna dari data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang telah diidentifikasi.

PEMBAHASAN

Salah satu isu yang diperdebatkan ialah isu global warming atau perubahan iklim. Sebagai salah satu negara superpower Amerika Serikat membuat negara-negara lain menaruh harapan terhadap peran Amerika Serikat dalam berbagai isu global, termasuk isu perubahan iklim. Dalam isu lingkungan serta perubahan iklim ini Amerika Serikat dinilai masih lemah, terutama dalam hal aksi iklim skala internasional. Pada tahun 1969, Amerika Serikat mengesahkan Undang-Undang mengenai kebijakan lingkungan nasional. Pasca Undang-Undang tersebut disahkan dan diberlakukan, peran federal menjadi sangat tinggi, padahal sebelumnya Amerika Serikat telah mempunyai bagian khusus yang bertanggung jawab dalam hal perlindungan iklim. Amerika Serikat menerapkan kebijakan lingkungan pada tahun 2010, dimana lebih dari setengah bangsa Amerika Serikat telah menerapkan berbagai program yang mendukung kebijakan lingkungan, meskipun implementasi kebijakan lingkungan khususnya dalam hal iklim ini secara menyeluruh masih terbilang lemah.

1) PERUBAHAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN AMERIKA SERIKAT

Pada saata masa pemerintahan George H W.Bush, Amerika Serikat mendukung aksi iklim dengan adanya dukungan politik yang cukup kuat. Pada masa George H.W.Bush Amerika Serikat mengalami pencaipaan yang besar yaitu mensponsori amandemen penting dalam Clean Air Act pada tahun 1970. Namun kebijakan iklim Amerika Serikat di masa Bush dinilai tidak berhasil atau cacat sebab adanya penolakan terhadap upaya reduksi serta menstabilkan gas rumah kaca atau gas karbon. Dibawah kepemimpinan Bill Clinton Amerika Serikat mengambil langkah dalam skala internasional mengenai kebijakan

iklim, yaitu dengan menyetujui Protokol Kyoto yang merupakan sebuah perjanjian dalam rangka mitigasi iklim dari COP yang dibawah naungan UNFCCC. Namun, langkah tersebut terhalang oleh penolakan senate untuk meratifikasi kesepakatan tersebut. Dengan demikian, peran Amerika Serikat pada Protokol Kyoto terhenti sepenuhnya pada masa pemerintahan Bush. Maka dari itu, Bush membuat kebijakan alternatif yaitu penyusunan kebijakan pengurangan emisi gas rumah kaca.

Pada masa kepemimpinan Barack Hussein Obama tahun 2008 dimana dalam periode ini membawa harapan baru pada masyarakat internasional agar sikap Amerika Serikat dalam menghadapi perjanjian yang telah dihasilkan oleh *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) menjadi lebih positif. Presiden Obama berasal dari partai Demokrat, dimana hal tersebut menimbulkan bahwa Amerika Serikat yang lebih peduli terhadap isu lingkungan. Partai Demokrat sendiri memiliki focus pada bidang serikat kerja, kontrol senjata serta isu lingkungan, seperti kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden ke 42 yaitu William Jefferson Clinton yang pro lingkungan.

Dalam periode kedua dalam masa kepemimpinannya, Presiden Obama menunjukkan sifat yang berbeda dari kepemimpinannya pada periode pertama pada UNFCCC, yaitu Obama menunjukkan sifat yang lebih mendukung dan juga positif terhadap perjanjian yang dibentuk oleh UNFCCC. Obama melakukan pengesahan terhadap perjanjian yang telah dibentuk oleh UNFCCC yaitu *Paris Agreement* pada tahun 2016. Pengesahan perjanjian tersebut membuktikan bahwa Obama memang memiliki arah kebijakan luar negeri yang mendukung pada perbaikan dampak negative dari perubahan iklim. Memasuki periode pemerintahan Presiden Donald Trump, kebijakan iklim Amerika Serikat pada masa pemerintahan Presiden Obama dikaji kembali dan juga berusaha untuk dihapuskan, sebab dalam masa kampanye pemilihan Presiden pada tahun 2016 ia menyatakan bahwa seorang yang ragu terhadap isu lingkungan. Maka dari itu pada saat Trump

terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat ia langsung merealisasikan hal tersebut.¹ Pada masa pemerintahan Trump membuat Amerika Serikat lebih berfokus dalam bidang ekonomi dengan tujuan kesejahteraan Masyarakat Amerika Serikat. Trump menganggap *Paris Agreement* ini memberikan kerugian bagi Amerika Serikat dalam bidang perekonomian. Mengingat Trump ini berasal dari Partai Republik serta beberapa Presiden terdahulu yang berasal dari Partai yang sama melakukan hal yang demikian. Menurut Trump, isu iklim dan lainnya merupakan hal-hal pendukung yang tetap bisa diatasi oleh Amerika Serikat dengan cara yang berbeda tanpa harus mematuhi aturan *Paris Agreement*. Trump percaya bahwa Amerika Serikat dapat mengurangi emisi karbonnya melalui cara yang berbeda dari negara-negara lain di *Paris Agreement* tanpa merugikan kondisi ekonomi Amerika Serikat.

Pada masa kepemimpinan Joe Biden, Amerika Serikat mengalami perubahan yang signifikan apabila dibandingkan dengan era kepemimpinan sebelumnya. Joe Biden merupakan seorang pemimpin yang dikenal dengan pendekatan pragmatismenya dan telah menunjukkan kualitas pemimpin yang mampu mengatasi berbagai masalah dengan kebijakan-kebijakan yang efektif. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam mengatasi berbagai macam tantangan ini mendapat pujian luas dari Amerika Serikat maupun masyarakat internasional.

Pada masa kampanye Presiden 2020, Biden menekankan kepemimpinan Amerika Serikat pada demokrasi, hak asasi manusia, serta kebijakan lingkungan. Biden menyebutkan prioritas utama kebijakan luar negeri, termasuk pada mempertahankan kepentingan vital Amerika Serikat, mengakhiri perang di Afghanistan dan Timur Tengah, meningkatkan diplomasi, memulihkan kemitraan internasional, memperbarui komitmen terhadap pengendalian senjata dan memimpin dunia dalam krisis iklim. Biden menjelaskan bahwa

¹ Fuad Rizki Satriyo et al., "Analisis Perubahan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Dalam Paris Agreement Pada Masa Pemerintahan Joe Biden" *Journal of International Relations*. 9.1 (2023): 1–19.

kebijakan luar negerinya dengan Trump sangat berbeda, terutama dalam komitmen terhadap kerja sama internasional. Selain itu, pada masa kampanye juga Biden berjanji untuk mengembalikan peran kepemimpinan Amerika Serikat dan memajukan keamanan, kemakmuran dan nilai-nilai dengan memperbarui demokrasi dan aliansinya di dalam maupun luar negeri. Maka dari itu, tindakan yang dilakukan dalam pengimplementasian kebijakan tersebut juga dijelaskan oleh Presiden Biden dalam pidatonya yang menyoroti posisi Amerika Serikat di dunia. Dalam pidatonya tersebut Biden menekankan kebijakan luar negerinya dengan slogan “*America is back*” sebagai penanda bahwa Amerika Serikat aktif kembali dalam peran globalnya.

2) KEPENTINGAN NASIONAL AMERIKA SERIKAT BERGABUNG KEMBALI PADA PARIS AGREEMENT

a. Kepentingan Keamanan

Konsep keamanan telah berkembang sejak Perang Dingin, beralih dari focus pada kekuatan militer tradisional ke ancaman yang lebih kompleks, termasuk bencana alam yang dipicu oleh perubahan iklim. Kebijakan keamanan dirancang untuk menghindari hasil yang merugikan. Akibat dari bencana tersebut, masalah yang signifikan diperkirakan akan muncul Ketika suhu global meningkat dua derajat celsius di atas tingkat pra-industri, yaitu kenaikan suhu maksimum yang efeknya masih dapat dikendalikan. Seluruh kebijakan keamanan Amerika Serikat mengacu pada *Interim National Security Strategy Guidance* (INSSG) yang diterbitkan pada 3 maret 2021. INSSG mengidentifikasi tiga prioritas utama, yaitu perlindungan keamanan warga sipil Amerika Serikat melalui pencegahan ancaman dari negara lain, musuh regional, ekstremis, dan ancaman transnasional lainnya, termasuk perubahan iklim, penyakit menular, serangan siber, dan informasi palsu. Maka dari itu kebijakan keamanan Amerika Serikat pada tahun 2021 masa pemerintahan Joe Biden juga meliputi isu lain, termasuk perubahan iklim.

b. Kepentingan Ekonomi

Faktor ekonomi sangat memengaruhi diplomasi perubahan iklim, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dampak ekonomi dari perubahan iklim, seperti pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi, stabilitas keuangan, dan kesejahteraan masyarakat, menjadi perhatian utama. Bencana alam terkait iklim dapat menyebabkan kerugian ekonomi besar dan memengaruhi sektor-sektor seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata. Partisipasi negara dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dipengaruhi oleh insentif dan hambatan ekonomi, termasuk dukungan finansial dan teknologi dari negara maju yang dapat mendorong negara berkembang untuk mengurangi emisi dan meningkatkan ketahanan. Namun, ketergantungan pada energi fosil dan prioritas pertumbuhan ekonomi dapat menghambat tindakan terhadap perubahan iklim.

Sebab Amerika Serikat merupakan negara dengan perekonomian terbesar di dunia, presiden Joe Biden berkomitmen untuk menggunakan kebijakan perdagangan sebagai alat untuk memajukan aksi global. Biden juga mendukung penerapan biaya penyesuaian pembatasan untuk impor yang intensif karbon untuk menciptakan kesetaraan dalam perdagangan global. Selain itu, Biden telah berjanji untuk membentuk Inisiatif Ekspor Energi Bersih dan Investasi Iklim serta meningkatkan pendanaan untuk *Mission Innovation* guna mempromosikan ekspor energi bersih dan inovasi teknologi di seluruh dunia. Presiden Biden, sepakat untuk memulihkan dan meningkatkan pendanaan iklim internasional AS serta kembali bergabung dengan Perjanjian Paris.

c. Kepentingan Identitas dan Nilai

Amerika Serikat dikenal sebagai negara yang sangat menghargai nilai-nilai demokrasi. Pemerintahnya

menerapkan sistem *check and balances*, yang merupakan prinsip konstitusional yang memastikan bahwa kekuasaan legislative, eksekutif dan yudikatif mempunyai kedudukan yang setara dan saling mengawasi. Dalam proses pembuatan kebijakan, Amerika Serikat tidak hanya bergantung pada kekuasaan dan legitimasi eksekutif termasuk presiden, namun memperhatikan kelompok kepentingan dan suara kelompok oposisi.

Joe Biden dikena dengan pendekatan pragmatisnya telah menunjukkan kepemimpinan yang efektif dalam mengatasi berbagai tantangan melalui kebijakan yang konkret dan berbasis fakta. Kebijakannya di bidang ekonomi, lingkungan dan kesehatan telah menghasilkan perubahan positif yang signifikan. Pendekatan ini tidak hanya menguntungkan Amerika Serikat namun untuk memperkuat posisinya sebagai pemimpin global yang dihormati.

Di bawah kepemimpinan Joe Biden, Amerika Serikat telah membuat berbagai perubahan yang berdampak baik secara domestic maupun internasional, termasuk kembali bergabung dengan *Paris Agreement* untuk menangani masalah lingkungan. Partisipasi Amerika Serikat dalam perjanjian tersebut penting untuk mengurangi pemanasan global, dengan Amerika Serikat berkontribusi pada 21% dari total pengurangan emisi global

KESIMPULAN

Perubahan iklim dianggap sebagai ancaman serius terhadap keamanan global. Selama pemerintahan Joe Biden, Amerika Serikat kembali aktif dalam forus internasional seperti Paris Agreement dan memasukkan isu perubahan iklim dalam kebijakan keamanan nasionalnya. Hal tersebut menunjukkan penggunaan soft power oleh Amerika Serikat, yaitu mengedepankan daya Tarik nilai-nilai lingkungan sebagai alat untuk mencapai tujuan keamanan dan kebijakan luar negeri. Biden memperkuat upaya terkait perubahan iklim, berkomitmen untuk mengurangi gas emisi dan meningkatkan pendanaan untuk inisiatif internasional. Hal tersebut merupakan pergeseran signifikan dari kebijakan Trump yang mengabaikan isu iklim serta menarik diri dari *Paris Agreement*. Ekonomi juga memiliki peran penting dalam diplomasi perubahan iklim dengan negara-negara mempertimbangkan kepentingan ekonomi dalam negosiasi iklim internasional. Pemerintahan Biden berencana menggunakan kebijakan perdagangan untuk mendukung aksi iklim, termasuk penerapan biaya penyesuaian perbatasan untuk impor karbon dan peningkatan untuk inovasi energi bersih. Di bawah kepemimpinan Biden, Amerika Serikat mengedepankan nilai-nilai demokrasi dan lingkungan dengan bergabung kembali dalam *Paris Agreement* serta mendorong transisi ke energi bersih. Hal tersebut mencerminkan upaya untuk memperkuat posisi Amerika Serikat sebagai pemimpin global yang berkomitmen pada keberlanjutan dan tanggung jawab internasional. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam

menangani perubahan iklim mencerminkan kepentingan nasional yang mencakup aspek keamanan, ekonomi dan identitas negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell. John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Four. California: Sage Publications, 1994.
- Dietz, Thomas et al. "Political influences on greenhouse gas emissions from US states." *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 112.27 (2015): 8254–8259.
- Matondang, Erlinda. "Era Pemerintahan Biden Dan Implikasinya Terhadap Diplomasi Indonesia Projection of the Us Foreign Policy in Joe Biden Administration and Its Implication To Indonesia ' S Diplomacy." *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 11.3 (2021): 119–137.
- Rizki Satriyo, Fuad et al. "Analisis Perubahan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Dalam Paris Agreement Pada Masa Pemerintahan Joe Biden." *Journal of International Relations* 9.1 (2023): 1–19.
- Zhang, Hai Bin et al. "U.S. withdrawal from the Paris Agreement: Reasons, impacts, and China's response." *Advances in Climate Change Research* 8.4 (2017): 220–225. Available: <https://doi.org/10.1016/j.accre.2017.09.002>.
- "COP 26 Speeches and statements." *UNFCCC*, n.d. Online. Internet. 2 Jun. 2024. . Available: <https://unfccc.int/cop-26/speeches-and-statements>.
- "U.S. energy-related CO2 emissions rose 6% in 2021." *U.S Energy Informations Administration*, 2022. Available: <https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=52380>.